



Judul : DPR Berkunjung Ke Tiga Negara Dibiayai Mitra Kerja : Ada Aroma "Gratifikasi" Berjamaah
Tanggal : Jumat, 24 Mei 2013
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 1-9

DPR Berkunjung Ke Tiga Negara Dibiayai Mitra Kerja Ada Aroma "Gratifikasi" Berjamaah

KOMISI VII DPR saat ini sedang berkunjung ke China, Norwegia dan Selandia Baru dalam rangka membahas Kebijakan Energi Nasional. Anehnya, keberangkatan mereka ke tiga negara itu, pakai anggaran dari mitra kerjanya, yaitu Dewan Energi Nasional atau DEN.

Tentu ini mengundang tanda tanya. Apakah ini, bisa dianggap sebagai sejenis gratifikasi?

"Terima parcel lebaran saja dilarang, lha kok ini mengizinkan keberangkatan tiga kloter ke luar negeri

yang dibiayai DEN. DPR sudah punya anggaran sendiri, kenapa dibiayai mitra kerja? Kalau dananya habis, kan bisa ditunda tahun depan, kenapa kok seperti kejar setoran saja," kata Profesor Muladi, kemarin. Politisi senior Golkar itu mendapat kabar, kunjungan ke tiga negara itu sudah disetujui pimpinan DPR dan KPK.

Keberangkatan Komisi VII DPR terbagi tiga kloter. Pada 14 Mei 2013, kloter pertama ke China. Lalu, kloter kedua menyusul ke Norwegia (19-25 Mei), dan kloter kedua, ke Selandia Baru (30 Juni-4 Juli 2013).

Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana menjelaskan, kunjungan itu dilakukan berdasarkan kesepakatan

kerjasama antara Dewan Energi Nasional dengan pihaknya.

Kloter yang ke Cina terdiri dari Totok Daryanto (PAN), I Wayan Gunastra (PD), Rachmat Hidayat (PDIP), Irna Narulita (PPP), Kus Indarwati (Sekretariat Komisi VII) dan Rachmat Hidayansyah Razak (Tenaga Ahli Komisi VII).

Kloter yang Norwegia terdiri dari Achmad Farihal (PPP), Efi susilowati (PD), Siti Romlah (PD), SW. Yudha (PG), Halim Kalla (PG), Irvansyah (PDIP), Nurhasan Zaidi (PKS), Alimin Abdullah (PAN), Nur Yasin (PKB), Remy Amir (Sekretariat Komisi VII) dan Lukman Malanuag (Tenaga ahli komisi VII).

Dan kloter ke Selandia Baru terdiri dari Sutan Bhatoegana (PD), Daryatmo Mardiyanto (PDIP), Jhoni Allen Marbun (PD), Sumanggar Milton Pakpahan (PD), Teuku Irwan (PD), Azwir Dainy Tara (PG), Bobby Adhityo Rizaldi (PG), Bambang Wuryanto (PDIP), Andi Rahmat (PAN), Irfan Basuki Rahmat (Sekretaris Komisi VII), Mawardi Tenaga (Ahli Komisi VII).

Muladi, yang politisi senior Golkar ini mendapat kabar, pembiayaannya bukan hanya menyangkut tiket pulang-pergi, dan fasilitas hotel selama di luar negeri, tetapi juga pemberian uang saku selama kunjungan. Biasanya itu diberikan secara kontan, tanpa tanda tangan.

"Saya heran, saat dilapori soal kunjungan ini kok KPK langsung setuju. Apa sudah lupa, ini bukan gratifikasi? Jadi, dengan kebijakan ini, KPK diguyupitik (dichertawai ayam) karena telah

menjadikan dirinya sebagai lembaga pemberi izin dan membenaran terhadap hal-hal yang dilarang," ujarnya.

Seharusnya KPK konsisten melaksanakan UU Tipikor, tidak perlu membuat diskripsi tentang gratifikasi. Karena ia khawatir, diskripsi tersebut akan menjadi modus operandi dan ditiru yang lain.

"Payah kalau begitu, apalagi kalau dalam praktek terjadi penyimpangan yang menyebabkan kerugian negara, siapa yang bertanggung jawab," katanya.

Bekas Hakim Agung itu juga menyayangkan, kenapa para pimpinan DPR, malah ikut menyetujui tindakan berbau gratifikasi ini.

"Saya minta Badan Kehormatan (BK) DPR memeriksa seluruh anggota Komisi VII DPR yang *toyoh-toyoh* (pergi) ke luar negeri untuk menyusun kebijakan energi nasional," pinta Muladi.

Ketua Kaukus Anti Korupsi DPD RI I Wayan Sudirta mengatakan, kunjungan ke tiga negara itu, jika menjadi agenda DPR dan disetujui pimpinan DPR, mestinya seluruh pembiayaannya ditanggung DPR, tidak bisa dibiayai pihak luar.

"Perlu dipertanyakan, apa betul KPK menyetujui hal-hal seperti itu? Apakah tepat dan ada kewenangan untuk itu? Agak kaget juga kalau KPK ikut memberikan persetujuan kepergian orang," kata Wayan.

Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo menegaskan, apapun alasannya, semua kunjungan DPR dibiayai negara. Apalagi, ada kaitan dengan penyusunan kebijakan energi nasional. Itu sarat kepentingan. "Kunjungan kerja komisi yang dibiayai mitra kerja patut dipertanyakan," ujarnya. ■ HPS